

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN *FAMILY DEVELOPMENT SESSION* (FDS) PADA SESI PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN ANAK DI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**  
(Studi di Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung)

Anindya Nurfitria Dewi  
Dinas Sosial Kabupaten Bandung  
anindyanurdewi@gmail.com

**ABSTRAK**

Sensus penduduk 2020 mencatat terdapat persentase masyarakat miskin sebesar 10,19 persen atau 27,55 juta jiwa. Pemerintah berupaya mengurangi persentasenya dengan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satu syaratnya yaitu dengan menghadiri kegiatan *Family Development Session* (FDS) untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dengan harapan menjadi keluarga yang lebih berketahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan kegiatan *Family Development Session* pada sesi Pengasuhan dan Pendidikan Anak di Program Keluarga Harapan. Metode yang digunakan adalah wawancara secara terbuka. Hasil temuan yang didapatkan penyelenggaraan kegiatan *Family Development Session* (FDS) pada sesi Pengasuhan dan Pendidikan Anak di Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ciparay Kab. Bandung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan *Family Development Session* yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI.

**Kata kunci:** *Family Development Session*, Program Keluarga Harapan.

**ABSTRACT**

*The 2020 population census noted that the percentage of poor people was 10.19 percent or 27.55 million people. The government seeks to reduce the percentage by providing conditional social assistance to poor and vulnerable families, namely the Program Keluarga Harapan (PKH). One of the conditions is to attend Family Development Session (FDS) activities to increase insight and knowledge in the hope of becoming a more resilient family. This study aims to analyze the implementation of Family Development Session activities in the Child Care and Education session in the Family Hope Program. The method used is an open interview. The findings obtained were the implementation of Family Development Session (FDS) activities at the Child Care and Education session at the Family Hope Program in Ciparay District, Kab. Bandung has been going well in accordance with the Family Development Session Implementation Guidelines that have been set by the Indonesian Ministry of Social Affairs.*

**Keywords:** *Family Development Session*, Program Keluarga Harapan.

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyelenggarakan sensus penduduk pada tahun 2020, menyebutkan sejak 2010 hingga September 2020 jumlah penduduk Indonesia bertambah hingga mencapai 270,2 juta jiwa atau meningkat 32,65 juta jiwa selama 10 tahun terakhir. (beritasatu.com) Peningkatan angka kependudukan yang signifikan ini akan membuat Indonesia bertemu dengan masa bonus demografi pada beberapa dekade mendatang. Hal ini selaras dengan siaran pers yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2007, bahwa pada tahun 2030-2040 Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi merupakan kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) angkanya lebih besar dibandingkan dengan usia tidak produktif (usia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun). (Bapennas, 2017)

Keberhasilan masa bonus demografi Indonesia yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2030-2040 ditentukan salah satunya oleh aspek Sumber Daya Manusia (SDM). *World Bank* atau Bank Dunia pada September 2020 menerbitkan laporan “*The Human Capital Index 2020 Update: The Human Capital in the Time of COVID-19*”. Laporan tersebut menyebutkan *Human Capital Index* (HCI) atau Indeks Sumber Daya Manusia Indonesia 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,54, naik dari 0,53 pada tahun 2018. (2020). Meskipun demikian, Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan bahwa HCI Indonesia masih jauh tertinggal dari negara Asia lainnya. Dari 157 negara, Indonesia menduduki peringkat 87, jauh di bawah negara tetangga lainnya seperti Vietnam dengan skor 0,67 menduduki peringkat 48, Singapura memiliki skor 0,88 dan menduduki peringkat 1, Malaysia dengan skor 0,67 berada pada peringkat 55, Thailand dengan skor 0,60 berada di peringkat 65 dan Filipina dengan skor 0,55 dengan peringkat 84. (Victoria, 2019). Jati (2015:18) melihat bahwa fenomena bonus demografi di Indonesia belum mampu dimanfaatkan oleh pemerintah secara maksimal. Hasil analisisnya menyebutkan, fenomena bonus demografi, baik dalam segi produksi maupun konsumsi, sama-sama belum kuat pondasinya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Padahal, Suryadi (2012: 3) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia perlu disiapkan untuk mencapai keunggulan dan daya saing dalam era percaturan global.

Di balik angka indeks sumber daya manusia Indonesia yang mengalami peningkatan setiap tahun, masih terdapat kesenjangan ekonomi di masyarakat. Pada sensus pendudukan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, tercatat persentase masyarakat miskin sebesar 10,19 persen atau 27,55 juta jiwa. Kesenjangan ekonomi ini berdampak pada sulitnya keluarga miskin atau prasejahtera mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi orang tua dan anak-anaknya. Hal tersebut, jika terjadi terus-menerus, menyebabkan anak-anak dari keluarga prasejahtera tidak mengalami peningkatan kualitas diri dan akan menghadirkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas.

Berbagai upaya dilakukan oleh para pemangku kebijakan untuk dapat membantu dan memfasilitasi keluarga miskin. Banyak program yang telah diselenggarakan oleh pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), subsidi beras bagi masyarakat miskin (Raskin), dan yang saat ini sedang berjalan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Permensos nomor 1 tahun 2018 menjelaskan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar pada data terpadu program penanganan fakir miskin.

Program Keluarga Harapan adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut berada di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). PKH berbentuk program asistensi sosial bagi keluarga prasejahtera atau rumah tangga miskin yang harus memenuhi kualifikasi tertentu, rentan terhadap risiko sosial dan memberlakukan persyaratan yang telah ditentukan dengan harapan dapat mengubah perilaku. Kualifikasi peserta PKH adalah rumah tangga miskin kronis.

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan langsung tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Syarat yang diberikan dalam program tersebut adalah upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Peserta PKH atau disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berkewajiban untuk menyekolahkan anaknya, memeriksakan tumbuh kembang balitanya secara rutin ke posyandu, memperhatikan kecukupan gizi anak-anaknya, dan beberapa hal lainnya.

Pada penyelenggaraannya, PKH bertujuan untuk : 1) meningkatkan taraf kehidupan keluarga penerima manfaat melalui fasilitas akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; 2) mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan meningkatkan pemasukan keluarga miskin dan rentan; dan 3) membangun perubahan perilaku dan kemandiri pada keluarga penerima manfaat dalam upaya mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Pendidikan di sekolah tidak dapat berjalan maksimal tanpa dukungan dan kerja sama dari orang tua sebagai pendidik dan pengasuh anak-anaknya di rumah. Hal ini juga berlaku pada proses pendidikan anak-anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Namun keluarga miskin ini tidak banyak bersentuhan dengan akses informasi terkait pengasuhan dan pendidikan anak. Masih banyak keluarga miskin yang pada praktek pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya hanya sekedarnya saja. Hal ini bisa diakibatkan oleh tekanan ekonomi yang berat, minimnya kesadaran orang tua terkait pengetahuan

mengenai pendidikan dan pengasuhan anak, ada punya orang tua yang beranggapan bahwa ketika anaknya bersekolah maka pendidikan anaknya sudah terpenuhi.

Maka pada pelaksanaan PKH terdapat sebuah kegiatan asistensi atau pendampingan yaitu Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session* (FDS). FDS dihadirkan untuk memfasilitasi para orang tua dari peserta PKH mengakses informasi terkait wawasan mengenai pendidikan dan pengasuhan anak yang baik dan seharusnya seperti apa. Harapannya proses pendidikan di sekolah dan di rumah atau keluarga dapat bersinergi dalam upaya meningkatkan kualitas diri anak.

Pada kegiatan *Family Development Session* (FDS) yang menyelenggarakannya ialah pendamping sosial PKH. Peran pendamping sosial sangat penting sebagai yang terjun dan berhadapan langsung dengan para keluarga penerima manfaat (KPM). Rahmawati (2017) menyebutkan pendamping sosial PKH memiliki empat peran yaitu: 1) peran keterampilan fasilitatif; 2) peran keterampilan mendidik; 3) peran ketrampilan teknis; dan 4) peran keterampilan perwakilan masyarakat. Keempat peran tersebut diharapkan mampu membantu dan memfasilitasi KPM agar mampu menjadi lebih berdaya dan menjadi keluarga yang lebih sejahtera. Permensos nomor 1 tahun 2018 dalam pasal 49 menjelaskan pendampingan PKH dimaksudkan untuk memastikan KPM menerima hak dan juga memenuhi kewajiban yang sudah ditetapkan sebagai syarat penerima manfaat. Tujuan penelitian ini secara lebih khusus adalah untuk menganalisis penyelenggaraan kegiatan *Family Development Session* pada sesi Pengasuhan dan Pendidikan Anak di Program Keluarga Harapan.

## KAJIAN TEORI

### A. Konsep Manajemen Program Pendidikan

Manajemen program pendidikan terdiri dari tiga suku kata yang masing-masing memiliki definisi. Manajemen menurut Sudjana (2010) adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih pada suatu kelompok, organisasi atau lembaga. Sedangkan program adalah kegiatan yang mengandung komponen-komponen kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok. Komponen program terdiri dari tujuan, sasaran, isi, jenis kegiatan, waktu, proses, fasilitas, media, biaya dan kelompok yang menyelenggarakannya.

Pada manajemen program pendidikan, khususnya di pendidikan nonformal, terdapat beberapa tahapan dalam prosesnya yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan dan evaluasi.

#### 1. Perencanaan

Perencanaan menurut Waterson (dalam Sudjana 2010: 55) adalah usaha sadar dan terorganisir yang dilakukan terus menerus untuk menentukan alternatif terbaik dari beberapa alternatif tindakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian Marno dan Triyo Suprijatno (2008:13) memaparkan, perencanaan yaitu salah satu hal yang perlu dibuat untuk setiap usaha dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Lebih lanjut Made Pidarta (2005: 101) menyebutkan terdapat 13 unsur yang ada dalam perencanaan, yaitu: 1) menentukan kebutuhan; 2) menentukan tujuan, misi, atau kebijakan; 3) mencari informasi atau data; 4) melakukan forecasting dan memprogram; 5) melakukan prioritas; 6) menspesifikasi tujuan; 7) menentukan alat-alat; 8) menentukan alternatif-alternatif pemecahan masalah; 9) menentukan sumber-sumber pendidikan; 10) menentukan rincian keuangan; 11) membuat standar performa; 12) mengorganisasikan orang-orang; dan 13) mengimplementasikan yang sudah direncanakan.

Pada pengimplementasi dan kebijakan publik dapat terbagi menjadi 2 pendekatan, yaitu:

- 1) Model Pendekatan *Top-Down*, yaitu menurut Wibawa (2017) implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai serta keputusannya diambil dari tingkat pusat. Sehingga pendekatan *top down* yaitu suatu pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan di tingkat pusat.
- 2) Model Pendekatan *Bottom-Up*, merupakan suatu implementasi suatu kebijakan di lapangan yang memberikan keleluasaan dalam penerapannya. Model *bottom up* yaitu suatu pendekatan yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan keputusan bersama. (Wibawa, 2017)

#### 2. Penggerakan

Penggerakan adalah upaya untuk dapat pemimpin dan menggerakan (memotivasi) seseorang atau sekelompok orang untuk menumbuhkan dorongan dalam diri orang-orang untuk melakukan tugas

atau kegiatan yang diberikan kepadanya sesuai dengan rencana agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan (Sudjana, 2010:14). Motivasi berfungsi sebagai pendorong, penentu arah kegiatan, penyeleksi kegiatan atau perbuatan seseorang yang dimotivasi

Pada pelaksanaan penggerakan atau memotivasi ini, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu: 1) jenis motivasi yang memberi harapan dan jenis motivasi yang menyadarkan perlu untuk digabungkan agar hasil motivasi dapat bertahan lama pada pihak yang dimotivasi; 2) jenis motivasi yang bersifat menyadarkan sangat baik untuk dapat diterapkan, meski hasilnya belum dapat terasa dalam waktu dekat namun motivasi yang terbangun dapat bertahan dalam jangka panjang; dan 3) jenis motivasi yang bersifat memaksa sebaiknya menjadi pilihan terakhir, karena motivasi yang bersifat memaksa jika diterapkan hasilnya akan langsung terasa namun sulit untuk bias dipertahankan dalam jangka panjang. (Sudjana, 2010:145)

### 3. Pembinaan

Menurut Direktorat Bantuan Sosial (2007:4) pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan berupa fasilitas yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhannya, memecahkan masalah dan mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

### 4. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu metode untuk mengukur hasil dari kegiatan pendidikan. Jenis evaluasi berdasarkan tingkat formalitas dan ketetapannya, yaitu : 1) evaluasi informal; 2) evaluasi semi formal; dan 3) evaluasi formal dan penelitian ilmiah. Selain menurut tingkatannya, evaluasi pun dikelompokkan menurut tujuannya, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif merupakan usaha mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan selama masa pengembangan program. Sedangkan evaluasi sumatif menilai manfaat program versi terakhir. (Suprijanto, 2005:214)

Suprijanto (2005:215) menjelaskan manfaat dari evaluasi ialah sebagai berikut: 1) menentukan patokan awal; 2) mengetahui keberhasilan suatu kegiatan; 3) mengecek keefektifitasan suatu program; 4) memberikan rasa aman kepada pelaksana tugas; 5) memberikan bukti konkret kepada pihak yang terkait; dan 6) meningkatkan sikap profesional kepada penerima evaluasi.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif dikarenakan masalah penelitian yang peneliti amati adalah masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat miskin. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini didasari pada fokus dan situasi objek yang diteliti yaitu penyelenggaraan kegiatan *Family Development Session* (FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) pada Program Keluarga Harapan, karena itu pada proses penelitiannya memerlukan pengamatan secara mendalam.

Partisipan yang dilibatkan pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan *Family Development Session* (FDS) yaitu Pendamping Sosial PKH, sebagai pihak yang mengatur, membina, menyelenggarakan dan menjadi fasilitator dalam kegiatan FDS. Pertimbangannya adalah sebagai yang berperan penting dalam proses terlaksananya kegiatan FDS dan terus mendampingi KPM secara berkelanjutan.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah wawancara. Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara terbuka dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara terbuka digunakan agar subjek penelitian mengetahui bahwa mereka sedang diteliti, sehingga mereka tahu tujuan dan maksud dari wawancara tersebut. Wawancara bebas terpimpin digunakan untuk mencari jawaban sesuai rancangan penelitian namun dapat mengeksplorasi keadaan-keadaan yang ada di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya perencanaan yang baik pula. Perencanaan yang baik menurut Cunningham (dalam Made Pidarta, 2005: 1) menyebutkan bahwa perencanaan adalah proses menyeleksi dan menghubungkan fakta-fakta, imajinasi-imajinasi, dan asumsi-asumsi yang bertujuan untuk memvisualisasi dan memformulasikan hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batasan yang dapat diterima yang akan digunakan

untuk penyelesaian di masa yang akan datang. Dan sebaiknya semua pihak baik pendidik maupun peserta didik ikut terlibat dalam perencanaan ini.

Namun, hal ini tidak dilaksanakan pada penyelenggaraan kegiatan *Family Development Session* Program Keluarga Harapan, khususnya di Kec. Ciparay Desa Pakutandang. Hal ini dikarenakan penentuan tujuan, isi materi, tahapan dan alur pelaksanaan, dan juga sumber belajar semua sudah ditentukan oleh Kemensos yang dikemas melalui modul. Pendamping sosial sebagai penyelenggara kegiatan hanya mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis saja seperti media pembelajaran, jadwal kegiatan dan tempat kegiatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wibawa (2017) mengenai implementasi kebijakan publik dengan pendekatan *top down* yaitu suatu pelaksanaan kegiatan yang segala prosedur dan tujuannya telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan di tingkat pusat, disini yaitu Kementerian Sosial sebagai pembuat kebijakan beserta prosedur dan tujuan program.

Dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar secara umum pun belum sepenuhnya dapat dilakukan karena berpatok pada modul yang telah diterbitkan oleh Kemensos, yaitu Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Modul Pendidikan dan Pengasuhan Anak. Sehingga tema kegiatan, isi materi, dan alur kegiatan semua harus selaras dengan modul tersebut. Namun pendamping sosial berusaha untuk dapat memfasilitasi kebutuhan belajar KPM dengan menekankan pada poin-poin bahasan yang mereka butuhkan. Untuk mengetahui kebutuhan belajar KPM ini, pendamping bertanya secara terbuka di forum mengenai permasalahan yang sedang KPM hadapi terkait pengasuhan anak. Hal ini selaras dengan penjelasan dari Direktorat Bantuan Sosial (2007:4) terkait pendampingan yaitu suatu proses pemberian kemudahan berupa fasilitas yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhannya, memecahkan masalah dan mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Hal tersebut baik untuk proses belajar KPM, karena KPM mendapatkan materi yang sesuai dengan masalah dan persoalan yang sedang dihadapinya saat ini.

Tahapan pelaksanaan kegiatan *Family Development Session* (FDS) dimulai dengan Pendamping Sosial mengulas kembali materi di pertemuan sebelumnya dan mengecek daya ingat KPM terhadap materi yang sebelumnya serta pengimplementasiannya. Kemudian pemaparan materi sesuai tema pada hari tersebut, menayangkan video edukasi yang disiapkan Kemensos dalam sepaket dengan modul, melakukan sesi diskusi antar KPM dan dilanjut dengan tanya jawab. Pada proses pelaksanaannya pun Pendamping Sosial lebih mengedepankan keaktifan dan keterlibatan KPM dalam kegiatan, sehingga bukan hanya materi satu arah saja dari Pendamping Sosial. Mengutamakan keaktifan dan keterlibatan KPM pun sudah dirancang dalam modul yaitu KPM sebagai pusat dalam kegiatan. Hal ini selaras dengan salah satu ciri dari pembelajaran orang dewasa yang dikemukakan oleh Suprijanto (2005:44) yaitu Mengutamakan peran orang dewasa sebagai peserta didik atau *student center*.

Pada proses pelaksanaan kegiatan *Family Development Session* (FDS) Pendamping Sosial melakukan berbagai metode dan stimulasi agar semua KPM dapat terlibat secara aktif, hal ini agar setiap KPM mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dalam proses belajar lebih lanjutnya agar dapat menyerap informasi dan materi yang dibahas secara maksimal. Upaya stimulasi ini dilakukan dengan beberapa cara seperti melakukan tanya jawab dengan KPM, menanyakan kondisi pengasuhan di rumah dengan anak-anak, meminta pendapat dan respon atas hal yang sedang dibahas kepada KPM, dan meminta KPM untuk menceritakan pengalamannya yang serupa dengan tema yang sedang dibahas. Setelah para KPM mulai terlibat aktif dalam kegiatan, Pendamping Sosial tidak segan untuk mengapresiasi dengan memuji dan berterima kasih kepada KPM tersebut sambil menyebutkan nama KPM tersebut. Dengan cara seperti itu mereka menjadi merasa dihargai dan dihormati.

Hal ini sejalan dengan beberapa ciri-ciri dari pendidikan orang dewasa yang dipaparkan oleh Suprijanto (2005:44), yaitu: 1) orang dewasa akan belajar jika pendapatnya dihargai dan dihormati; 2) suasana belajar diharapkan dapat menyenangkan dan menantang bagi peserta didik; 3) orientasi belajar untuk orang dewasa terpusat pada kehidupan nyata; 4) dimungkinkan untuk terjadi komunikasi timbal balik dan pertukaran pendapat; dan 5) orang dewasa umumnya memiliki pendapat, kecerdasan, dan cara belajar yang berbeda dalam belajar. dan

Sumber dan media belajar yang digunakan dalam kegiatan *Family Development Session* (FDS) beberapa sudah ditentukan serta disediakan oleh Kemensos, seperti Modul FDS, Buku Pintar, poster dan brosur. Namun pada prakteknya wawasan dari Pendamping Sosial juga dapat menjadi sumber belajar. Sebab ketika wawasan Pendamping Sosial kaya dan luas, ia dapat membagikan wawasan

tersebut dengan pemahaman yang lebih dalam dan mendetail. Hal ini belum selaras dengan ciri-ciri pendidikan orang dewasa yang dipaparkan oleh Suprijanto (2005:44) yaitu sumber bahan belajar bagi orang dewasa berada pada dirinya. Meski masih terkesan masih disuapi, namun begitulah pengimplementasian kebijakan dengan pendekatan *top down*.

Media belajar yang telah disebutkan sebelumnya sangat membantu dalam proses penyelenggaraan kegiatan *Family Development Session* (FDS). Hal ini karena KPM dapat menangkap informasi bukan hanya secara audio, namun juga secara visual melalui media gambar dan video yang ditayangkan. Dengan adanya media belajar yang variatif pun menjadikan penyelenggaraan kegiatan menjadi lebih menarik dan tidak monoton, sehingga KPM dapat tetap fokus dan tidak membosankan. Hal ini mendukung pemaparan Suprijanto (2005:44) yang menyebutkan ciri-ciri dari pendidikan orang dewasa yaitu suasana belajar diharapkan dapat menyenangkan dan menantang bagi peserta didik.

Hambatan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan kegiatan *Family Development Session* (FDS) yaitu seperti waktu kegiatan yang mundur karena KPM terlambat datang, tempat kegiatan yang seringkali menggunakan rumah salah satu KPM kurang memadai baik secara kapasitas maupun pencahayaan, dan bahkan dari pemahaman KPM yang belum begitu banyak paham mengenai pola asuh. Pemahaman yang belum begitu dalam dari KPM tidak lepas dari faktor tingkat pendidikan yang belum tinggi yaitu sekitar SD hingga SMA, dan keterbatasan KPM dalam mengakses informasi yang lebih dalam dan luas.

Tahap akhir suatu kegiatan adalah evaluasi. Seperti yang dipaparkan Morgan (dalam Suprijanto, 2005:215) mengenai tujuan utama dari evaluasi, yaitu: 1) untuk menentukan seberapa dekat peserta didik secara individual dan keseluruhan kelas telah mencapai tujuan umum yang telah ditentukan; 2) untuk mengukur tingkat perkembangan yang telah peserta didik capai dalam waktu tertentu; 3) untuk menentukan seberapa efektif bahan, metode, dan kegiatan pengajaran; dan 4) untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi peserta didik, instruktur, dan masyarakat.

Namun evaluasi pembelajaran pada kegiatan *Family Development Session* (FDS) yang dilakukan oleh Pendamping Sosial hanya untuk mengecek tingkat pemahaman dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari KPM. Evaluasi dilakukan secara lisan pada akhir kegiatan dan pertemuan berikutnya. Diakhir kegiatan Pendamping Sosial mengecek seberapa banyak dan mendalam materi yang diserap oleh KPM tentang topik yang dibahas pada hari tersebut. Sedangkan pada pertemuan berikutnya, Pendamping Sosial mengulas sambil meninjau ingatan KPM terhadap materi yang sebelumnya dibahas dan juga dicek penerapan yang sudah KPM lakukan dari hasil materi yang sudah dibahas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa penyelenggaraan kegiatan *Family Development Session* (FDS) pada sesi Pengasuhan dan Pendidikan Anak di Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ciparay Kab. Bandung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan *Family Development Session* yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. (2019). *Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2k2) Program Keluarga Harapan*. Indonesia: Kementerian Sosial RI.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Indonesia Tahun 2010*. Jakarta
- Pidarta, Made. (2005). *Perencanaan Pendidikan Parsipatori dengan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2), 161–169. <https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271>
- Sudjana, D. (2010). *Manajemen Program Pendidikan*. Bandung: Falah.
- Suprijanto. (2005). *Pendidikan Orang Dewasa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suprijanto. (2008). *Pendidikan Orang Dewasa Dalam Teori Hingga Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Suryadi, A. (2012). *Pendidikan Orang Dewasa Dalam Teori Hingga Aplikasi*. Widya Aksara Press.
- Victoria, A. O. (2019). *Bappenas: Kualitas SDM Indonesia Masih Ketinggalan Jauh dari Vietnam*. Katadata.  
<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5e9a50395709c/bappenas-kualitas-sdm-indonesia-masih-ketinggalan-jauh-dari-vietnam>
- Wibawa, R. Y. (2017). *Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Mall Dinoyo City (Study Kasus di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang)*. Malang. UMM.